NEGARA REPRESI DAN KETIMPANGAN GLOBAL: PENDEKATAN TEORI KRITIS TERHADAP ESKALASI PERANG IRAN-ISRAEL TAHUN 2025

M. Naufal Rizan Bahari¹, Try Danuwijaya², Eko Taviv Maryanto³

¹ Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

² Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

³ Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: naufalbahari46@gmail.com

Abstrak

Eskalasi konflik Iran–Israel tahun 2025 melalui pendekatan teori kritis untuk membongkar peran negara represif dan ketimpangan struktural global yang melatarbelakangi konflik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, artikel ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan sistem internasional yang timpang, hegemonik, dan bias terhadap kekuatan global tertentu. Negara-negara seperti Iran dan Israel memanfaatkan konflik sebagai sarana pelanggaran kekuasaan domestik, sementara aktor-aktor global turut memperburuk situasi melalui dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang tidak seimbang. Lembaga internasional dan narasi media arus utama juga memainkan peran dalam mereproduksi dominasi ideologis yang menghambat terciptanya perdamaian yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap konflik internasional, terutama dalam kaitannya dengan struktur ketimpangan global yang melandasinya.

Kata kunci: Teori Kritis; Negara Represif; Ketimpangan Global; Konflik Iran-Israel.

Abstract

The escalation of the Iran–Israel conflict in 2025 through a critical theory approach, aiming to uncover the role of repressive states and global structural inequalities underpinning the war. Using a qualitative-descriptive method and literature review, this study argues that the conflict is not an isolated event, but a reflection of an unequal, hegemonic international system biased toward certain global powers. States like Iran and Israel exploit the conflict to maintain domestic power, while global actors exacerbate the situation through disproportionate military, economic, and diplomatic support. International institutions and mainstream media narratives further reinforce ideological dominance that hinders the realization of a just peace. Accordingly, this article emphasizes the importance of critically examining international conflicts in relation to the underlying structures of global inequality.

Key words: Critical Theory; Repressive States; Global Inequality; Iran–Israel Conflict.

Article History:

Received : 2025-06-10

Revised : 2025-07-01

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

April 2025 menandai babak baru eskalasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Babak ini dimulai kala Israel melakukan kontak bersenjata dalam penyerangan konsulat Iran di Damaskus Suriah. Selain itu, serangan ini juga ditujukan ke area militer yang diduga kuat oleh Israel sebagai basis militer pro pemerintah Iran. Serangan ini menargetkan berbagai fasilitas vital seperti pusat komando, barak alutsista dan fasilitas militer lainnya. Israel mengklaim bahwa serangan ini ditujukan untuk mengantisipasi Suriah bagian Selatan menjadi basis kekuatan Iran yang baru. Israel menduga bahwa Iran sudah menyiapkan wilayah selatan Suriah akan punya keistimewaan yang sama dengan Lebanon Selatan yang sudah menjadi basis kekuatan proksi Iran sejak lama. (Christiastuti, 2025) Sebagai respon, pemerintah Suriah secara tegas mengutuk serangan Israel sebagai tindakan kriminal dan melanggar hukum internasional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan stabilitas negara Suriah,

serta menegaskan bahwa serangan tersebut mencederai upaya pemerintahan Suriah dalam menjaga keamanan internal dan menghalangi misi internasional.

Sebagai bagian dari kepentingan nasional, Iran merespon cepat serangan itu dengan mengirimkan rudal langsung ke wilayah teritorial Israel. Serangan ini menandai babak baru eskalasi konflik antara kedua negara sejak Revolusi Iran pada 1979. Serangan dalam skala besar ini mengakibatkan kedua negara terlibat dalam saling serang. Tercatat, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal menuju berbagai wilayah Israel. Berdasarkan klaim Israel, IDF (Israel Defence Force) berhasil mencegah 99% serangan Iran dengan fasilitas militer milik mereka. (Sejati & Hakim, 2025). Serangan balasan Israel di Isfahan pada 19 April menargetkan area militer utama di dekat fasilitas nuklir, menandakan ketegangan konflik yang akan semakin besar di kawasan Timur Tengah. Saling balas serangan ini telah mendorong Timur Tengah ke arah potensi perang terbuka di kawasan.

Secara historis, hubungan antara Iran dan Israel sebelum Revolusi Islam 1979 bersifat relatif harmonis dan didasarkan pada kepentingan strategis bersama di bawah rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang memandang Israel sebagai sekutu penting dalam menghadapi ancaman bersama dari nasionalisme Arab dan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Iran-Israel juga memiliki berbagai kesepakatan dalam berbagai bidang. Kerjasama ini mencakup bidang ekonomi yang signifikan, terutama ekspor minyak Iran ke Israel, kerja sama intelijen yang erat (melalui badan seperti Mossad dan SAVAK), serta transfer teknologi dan persenjataan antara kedua negara. (Ali et al., 2025). Namun, hubungan harmonis antara Iran dan Israel ini hanya bertahan sementara. Peristiwa Revolusi Islam Iran pada 1979 mengakhiri hubungan strategis kedua negara, karena rezim baru yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini mengadopsi ideologi ekspor revolusi Islam dan anti-imperialisme yang ekstrem, dengan mendefinisikan Israel sebagai "rezim Zionis" dan "anak buah" Amerika Serikat (AS), sekaligus menempatkan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai pilar sentral identitas revolusioner Republik Islam. (Akgül, 2024). Pergeseran ideologi ini berdampak langsung pada aliansi strategis; Iran tidak hanya memutuskan hubungan diplomatik dan mengutuk eksistensi Israel, tetapi juga secara aktif mencari konfrontasi, beralih dari sekutu tradisional Barat menjadi penentang utamanya, dan membentuk poros perlawanan bersama dengan kelompok-kelompok milisi seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina, yang difungsikan untuk melawan pengaruh Israel dan AS di wilayah tersebut. (Noviyanto et al., 2025). Dilihat dari sudut pandang Teori kritis, eskalasi perang terbuka antara Iran dan Israel pada tahun 2025, secara gamblang menggambarkan ketidaksetaraan yang tertanam dalam dan penindasan struktural yang melekat dalam tatanan global kontemporer. Jauh dari sekadar konflik regional yang terisolasi, perang ini merupakan bentuk nyata yang kuat dari bagaimana ketidakseimbangan kekuatan di kawasan, yang hanya dilanggengkan oleh negara-negara dominan dan ditopang oleh kapitalisme global, secara aktif menghasilkan ketidakamanan dan kekerasan. (Ryan, 2018). Aliansi militer yang sangat kuat secara global dan dukungan finansial substansial yang diberikan kepada Israel oleh Amerika Serikat yang menarik dukungan tidak hanya strategis tetapi juga mencerminkan tatanan hegemonik di mana kepentingan Barat, yang sering kali dibingkai sebagai nilai-nilai universal seperti keamanan atau demokrasi, melegitimasi intervensi yang menopang dominasi regional dan menekan tantangan terhadap status quo. Sebaliknya, ketergantungan Iran pada bantuan teknologi canggih dan persenjataan dari Tiongkok dan Rusia merupakan strategi perlawanan kontra-hegemoni yang disengaja. (Prayuda et al., 2021) Keberpihakan ini merupakan tantangan terhadap dominasi Barat dan membentuk apa yang oleh para aktor hubungan internasional dapat diidentifikasi sebagai "gerakan anti-sistemik" yang baru lahir yang berusaha membangun pusat kekuatan alternatif dan hegemoni global yang terlalu mengikat.

Seperti yang kita tahu, hegemoni ini terwujud tidak hanya melalui intervensi politik dan militer secara langsung, namun juga melalui arsitektur tata kelola internasional. Lembaga-lembaga kunci seperti Dewan Keamanan PBB yang secara teoritis dirancang untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, sering kali gagal menjalankan mandatnya secara netral karena keistimewaan struktural dari anggota Lima Negara Permanen (P5). (Fadya et al., 2024). Resolusi yang menyerukan langkah-langkah penting seperti gencatan senjata dalam konflik seperti perjuangan Israel-Palestina secara rutin dihalangi oleh hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar, yang kepentingan strategis, ideologis, dan ekonominya

sangat terkait dengan lintasan dan hasil dari konflik tersebut.(Akgül, 2024). Lebih jauh lagi, pengaruh hegemoni ini meluas dengan kuat ke ranah informasi dan persepsi. Kekuatan-kekuatan global yang dominan memiliki kontrol yang signifikan terhadap narasi yang disebarkan oleh media-media internasional, membentuk pemahaman publik dengan cara yang sering kali mencerminkan keberpihakan geopolitik mereka dan mengaburkan perspektif alternatif atau kompleksitas penuh dari konflik tersebut, sehingga memperkuat asimetri kekuasaan yang ada pada tingkat diskursif.(Ikenberry & Nexon, 2019). Dengan demikian, ketidakstabilan Timur Tengah bukan semata-mata produk dari faktor-faktor lokal tetapi secara intrinsik dibentuk dan dieksploitasi oleh sistem global yang dirancang untuk mempertahankan dominasi segelintir orang.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat Bagaimana Eskalasi Konflik Iran-Israel pada tahun 2025 mempengaruhi Ketimpangan Global dalam Perspektif Teori Kritis?, penulis juga akan menganalisis secara komprehensif bagaimana keterlibatan negara represi bisa saja membuat pengaruh besar dalam hegemoni global.

LITERATURE REVIEW

Teori Kritis dalam Hubungan Internasional (Robert W. Cox)

Teori kritis dalam Hubungan Internasional muncul secara signifikan sebagai tanggapan atas keterbatasan yang dirasakan dari pendekatan-pendekatan yang dominan, terutama realisme dan liberalisme, yang oleh para ahli teori kritis dianggap terlalu terfokus pada penyelesaian masalah dalam kerangka tatanan global yang ada. Dalam studi ini, penulis menggunakan pemikiran Robert W. Cox sebagai sandaran utama. Cox menyebut bahwa "Theory is always for someone and for some purpose", yang dapat dimaknai bahwa pemikiran atas suatu peristiwa tidak akan selalu pada pihak netral, namun akan berpihak pada suatu kepentingan dalam struktur social dan politik yang membutuhkannya. Dalam pemikirannya, Cox mencoba untuk memberikan interpretasi dan pemaknaan berbeda dalam Teori Pemecahan Masalah (Problem solving Theory) dan Teori Kritis (Critical Theory). Teori pemecahan masalah yang merupakan gabungan dari realisme dan liberalisme arus utama, menurut Cox, pendekatan ini akan "melihat dunia apa adanya" dan berfokus pada "membuat hubungan dan institusi yang ada berjalan dengan lancar" dengan menangani disfungsi tertentu dalam sistem tatanan politik. Teori ini melihat dan meninjau dalam batasan-batasan parameter sosial, politik, dan ekonomi yang ditetapkan oleh struktur kekuasaan yang ada, sehingga secara implisit melayani kepentingan pihak yang berkuasa dalam tatanan tersebut. Sebaliknya, teori kritis Cox menolak untuk menerima status quo sebagai sesuatu yang netral atau alamiah.(Cox, 1981). Teori ini bersifat historis, meneliti bagaimana tatanan tertentu muncul, berkembang, dan mungkin berubah, Dengan hal itu, Cox mengajak kita untuk melihat hubungan internasional sebagai produk konstruksi historis yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi-politik, relasi kekuasaan, serta produksi ideologi oleh aktor dominan.

Dalam melihat fenomena eskalasi konflik besar-besaran antara Iran dan Israel, pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat kerangka kerja esensial untuk memahami bahwa konfrontasi ini bukan semata-mata hasil kebijakan dua negara antagonis, melainkan produk yang tak terpisahkan dari struktur kekuasaan global yang timpang dan historis. Cox menekankan bahwa teori akan selalu "for someone and for some purpose", pernyataan ini menantang narasi objektivitas dalam hubungan internasional dan mengungkap bagaimana tatanan dunia yang ada melayani kepentingan kekuatan dominan sekaligus membentuk kondisi bagi konflik perifer.(Cox, 1981). Dalam konteks ini, baik Iran maupun Israel dapat dikategorikan sebagai kompleks negara-masyarakat yang bersifat represif, di mana elit penguasa di kedua negara secara sistematis memobilisasi sejumlah tindakan kekerasan negara dan narasi keamanan nasional untuk mempertahankan hegemoni domestik mereka.

Dari manifestasi pandangan Cox Dapat disimpulkan bahwa tatanan global hegemonik saat ini ditandai dengan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dan fragmentasi otoritas, yang secara intrinsik menghasilkan dan mempertahankan "negara represif" seperti itu sebagai bagian integral dari ekologi, karena mereka berfungsi sebagai ujung tombak kepentingan atau benteng pertahanan bagi negara-negara besar dalam persaingan global mereka. Dengan demikian, konflik Iran-Israel 2025 muncul bukan hanya dari permusuhan bilateral, tetapi lebih mendasar lagi sebagai manifestasi dari kontradiksi dan ketidakseimbangan yang melekat pada tatanan dunia yang ada, di mana dinamika kekuatan

global secara aktif memungkinkan dan mendorong penindasan dalam negeri dan konflik regional sebagai mekanisme untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan aktor-aktor tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang berkelanjutan tidak hanya menuntut diplomasi antara Teheran dan Tel Aviv, tetapi juga transformasi kritis terhadap struktur kekuatan global yang mendasari dan memperkuat siklus kekerasan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari kajian pustaka. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik Iran-Israel pada tahun 2025 dari perspektif teori kritis, yang menekankan pada struktur kekuasaan global, praktik negara yang represif, dan produksi ideologi dalam sistem internasional. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya bukan pada angka-angka, melainkan pada makna, relasi, dan konstruksi sosial yang membentuk konflik. Sumber data yang digunakan meliputi publikasi ilmiah (jurnal akademik dan buku-buku teori), laporan-laporan dari organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, Human Rights Watch, dan laporan media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian. Data ini ditelaah untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan kekuasaan dan intervensi global yang memperkuat ketidaksetaraan dan memperpanjang konflik.

Analisis ini bersifat interpretatif dan kritis, dengan menggunakan kerangka kerja Robert W. Cox, seorang tokoh terkemuka dalam teori kritis dalam hubungan internasional. Dalam kerangka ini, konflik tidak dipahami sebagai fenomena yang netral atau insidental, tetapi sebagai bagian dari konstruksi sejarah yang dikendalikan oleh kekuatan hegemonik. Dari sini, penulis mencoba untuk memberikan penjelasan yang analitis terkait bagaimana keterikatan antara negararepresif dan ketimpangan global dalam konteks eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel dalam sudut pandang Teori Kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

Negara Represif dan Eskalasi Perang Iran-Israel

Dalam mengkaji sudut pandang kedua negara dalam konteks negara represif, hal pertama yang harus dilihat adalah karakter rezim dari kedua negara tersebut. Karakter dasar rezim teokratis-otoriter Iran yang represif dan demokrasi etnis eksklusif Israel bertindak sebagai mesin yang kuat yang menopang dan mengintensifkan konflik berkepanjangan mereka, baik di dalam negeri maupun di tingkat regional, melalui siklus yang saling memperkuat di mana ancaman eksternal melegitimasi kontrol internal dan sebaliknya. Di Iran, kekuasaan terkonsentrasi di dalam elit teokratis sempit yang didominasi oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang berfungsi sebagai negara-dalam-negara, yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi yang luas dan menggunakan kekuatan koersif yang tidak terkendali untuk menekan setiap oposisi dalam negeri yang dianggap, dari aktivis hak-hak perempuan hingga etnis minoritas dan reformis. (Febrian, 2020). Penindasan internal yang sistematis ini membutuhkan narasi yang melegitimasi, yang dibangun oleh penguasa Iran di sekitar konsep "Poros Perlawanan" dan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh Israel dan sekutu-sekutu Baratnya; membingkai konfrontasi eksternal sebagai kebutuhan pertahanan melawan imperialisme mengalihkan perhatian dari keluhan dalam negeri dan menjustifikasi aparat keamanan yang meresap dan penindasan terhadap perbedaan pendapat sebagai hal yang penting untuk kelangsungan hidup nasional. (DW, 2024).

Sebaliknya, Israel, meskipun memiliki lembaga-lembaga demokratis untuk warga Yahudi, beroperasi sebagai "Demokrasi Eksklusif yang Sangat Dimiliterisasi" atau "Etnokrasi", mempertahankan kontrol sistematis atas populasi Palestina di dalam Israel melalui undang-undang yang diskriminatif dan, secara kritis, lebih dari jutaan orang lainnya di wilayah Palestina yang diduduki melalui pemerintahan militer yang berkepanjangan yang ditandai dengan pemberontakan. (Barzilai, 1999). Struktur kontrol dan penolakan terhadap penentuan nasib sendiri Palestina ini secara inheren menimbulkan perlawanan dan permusuhan regional. Israel pada gilirannya, memanfaatkan ancaman keamanan asli yang berasal dari kelompok-kelompok seperti Hamas atau Hizbullah yang merupakan proksi Iran dan permusuhan regional yang lebih luas yang dipupuk oleh kebijakan-kebijakan pendudukannya untuk menjustifikasi tindakan represif internal dan karakter

eksklusifnya. (Hessa Al-Khaled et al., 2025). Narasi ancaman eksistensial, yang terus-menerus diperkuat oleh retorika dan tindakan Iran, menjadi pembenaran utama untuk mempertahankan pendudukan, memperluas pengawasan dan kontrol atas warga negara Palestina di Israel, dan menekan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai tindakan yang tidak setia atau membahayakan keamananbatasan gerakan yang parah, perluasan pemukiman, dan serangan militer berkala. (Isaac & Hilal, 2011)

Dilihat dalam pandangan kritis, hal ini menciptakan hubungan simbiosis yang salah: Penindasan Iran mendorong kebijakan luar negerinya yang antagonis, memberikan Israel ancaman nyata yang diperlukan untuk membenarkan penindasan internal dan eksternalnya. Pada saat yang sama, kontrol represif Israel terhadap warga Palestina dan postur regionalnya memberi rezim Iran musuh eksternal yang sempurna untuk memvalidasi otoritarianisme domestik dan ideologi revolusionernya sendiri. (Machold, 2018). Siklus ini memastikan bahwa tidak ada rezim yang memiliki insentif yang tulus untuk melakukan deeskalasi atau reformasi domestik yang mendasar, karena keduanya mendapatkan legitimasi internal yang penting dari kelanggengan konflik eksternal, sehingga membuat konfrontasi menjadi mandiri dan resisten terhadap resolusi konflik berkepanjangan. (Gordon, 2008). Akibatnya, dasar-dasar represif dari kedua negara tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga menjadi pendorong yang aktif dan saling bergantung yang secara terus menerus meregenerasi konflik, menanamkannya secara mendalam di dalam sistem politik dan dinamika regional masing-masing.

Secara lebih mudah, eskalasi konflik antara Iran dan Israel secara signifikan dipicu dan ditopang oleh karakter represif kedua rezim, yang secara strategis menggunakan narasi ideologis untuk melegitimasi kekerasan yang ekstensif, yang secara bersamaan berfungsi sebagai alat konfrontasi eksternal dan kontrol sosial internal. Kedua negara membangun kerangka kerja ideologis yang rumit yang mengubah kekerasan dari tindakan reaktif menjadi instrumen penting untuk kelangsungan hidup negara, memperkuat ketidakseimbangan kekuatan internal sekaligus memperburuk konflik eksternal. (Eslami, 2025). Narasi dasar Iran berpusat pada "resistance to Zionism" yang memposisikan dirinya sebagai pembela garda depan dunia Islam melawan imperialisme Barat dan Israel. Ideologi ini, yang tertanam kuat dalam identitas revolusioner negara itu sejak 1979, memberikan pembenaran berkelanjutan untuk kebijakan regional yang agresif, dukungan untuk kekuatan proksi seperti Hizbullah dan Hamas, dan pengembangan kemampuan militer asimetris. (Poustchian, 2025)

Berbanding terbalik, narasi dominan Israel menekankan kebutuhan eksistensial untuk "mempertahankan diri" dan keamanan nasional tanpa kompromi dalam menghadapi permusuhan regional yang terus-menerus, terutama dari Iran dan proksinya. Narasi ini membenarkan operasi militer yang ekstensif, pendudukan wilayah Palestina, dan serangan preemiptive, dan membingkainya sebagai hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup negara. (Pratama et al., 2023). Namun, paradigma keamanan eksternal ini juga diinstrumentalisasi secara internal. Keadaan konflik dan darurat yang terus-menerus, yang didukung oleh narasi keamanan, melegitimasi pemeliharaan peraturan darurat, pengawasan yang ekstensif, dan pembatasan hak-hak warga negara Palestina di Israel dan penduduk di wilayah-wilayah yang diduduki, mengukuhkan tatanan internal yang sangat timpang yang ditandai dengan hegemoni Yahudi. (Baldwin, 2023). Akibatnya, kekerasan menjadi terlembagakan dan reproduktif dalam kedua konteks tersebut: secara eksternal, kerangka ideologis menjelek-jelekkan pihak lain, menghalangi diplomasi yang tulus, dan mengharuskan kesiapsiagaan atau tindakan militer yang terus menerus, sehingga menciptakan sebuah siklus aksi dan reaksi.

Pada akhirnya, eskalasi konflik yang berkelanjutan ini memberi aktor represif di Teheran dan Tel Aviv perlindungan legitimasi yang diperlukan untuk menekan perbedaan pendapat, membatasi kebebasan sipil, dan mempertahankan hirarki sosial-politik yang kaku dan tidak setara yang sangat penting bagi struktur kekuasaan mereka. Dengan demikian, sifat represif kedua rezim, yang bergantung pada pembenaran ideologis untuk kekerasan, menciptakan lingkaran setan yang memperkuat diri sendiri di mana kontrol internal membutuhkan konflik eksternal, dan ancaman eksternal membenarkan penindasan internal, sehingga pada dasarnya memperkuat dan memperpanjang konfrontasi secara keseluruhan. Ketimpangan Global dan Hegemoni Internasional dalam Konflik Iran-Israel

Dalam ancaman dan potensi besar dimana konflik ini bisa saja melebar dan punya dampak serius terhadap kestabilan global, masih ditemukan upaya keras yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam mendistribusikan kepentingan nasionalnya dan mencoba memfasilitasi negara sekutunya. Dinamika ini sangat jelas terlihat dalam konteks konflik Israel-Palestina dan Timur Tengah yang lebih luas, di mana aliansi-aliansi yang saling bersaing secara aktif melanggengkan permusuhan. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu utamanya, melalui dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang berkelanjutan, memberikan Israel kedalaman strategis yang signifikan yang mengisolasi dari tekanan-tekanan yang dapat memaksa penyelesaian yang dirundingkan atau ketaatan pada hukum internasional.(Hessa Al-Khaled et al., 2025). Sebagai contoh, AS telah memberi Israel lebih dari 130 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer bilateral sejak Perang Dunia II, mempertahankan keunggulan militer kualitatif dan memungkinkan operasi militer yang berkepanjangan. Hal ini dapat ditemukan juga dalam berbagai kesempatan di mana AS telah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi-resolusi yang mengkritik tindakan-tindakan Israel yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional oleh berbagai badan PBB dan organisasi-organisasi hak asasi manusia.(Horton, 2021). Akibatnya, dukungan ini tertanam di dalam sebuah sistem global di mana kekuasaan menentukan hasil-hasil institusional, mengurangi biaya-biaya yang dirasakan atas pendudukan dan eskalasi militer Israel, dan dengan demikian menopang dinamika inti konflik.

Akibat lebih besarnya lagi, kehadiran aktor netral dalam konflik ini sama sekali tidak menemukan titik temu penyelesaian konflik dan upaya resolusi yang adaptif. Hal ini justru memperlihatkan disfungsi dari lembaga-lembaga internasional yang seharusnya bisa meredakan konflik ini. Disfungsi yang dirasakan dan sering kali dapat dibuktikan dari lembaga-lembaga global, khususnya Dewan Keamanan PBB, secara signifikan memperburuk kecenderungan represif di dalam Iran dan Israel sementara secara bersamaan menghalangi jalan menuju penyelesaian konflik, sehingga melanggengkan siklus permusuhan baik secara internal maupun eksternal.(RISTIYANTI, 2025). Inti dari kegagalan institusional ini terletak pada ketidaksetaraan struktural DK PBB terutama pada hak veto lima anggota tetap di bawah Pasal 27 Piagam PBB, ditambah dengan kurangnya perwakilan dari negara-negara Selatan yang kronis. Sistem ini sering kali menghasilkan kebuntuan, mencegah tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran atau menengahi perselisihan, termasuk konflik Iran-Israel.(Winther, 2022). Contoh saja, ketika salah satu anggota negara yang punya hak veto menganggap tindakan terhadap sekutunya (misalnya, AS yang melindungi Israel atau Rusia dan Tiongkok yang melindungi Iran) bertentangan dengan kepentingannya, maka anggota tersebut dapat memblokir resolusi secara sepihak, sehingga membuat DK PBB tidak berdaya.

Ketidakterdayaan yang dapat diprediksi ini mengirimkan semacam pesan yang kuat kepada Teheran dan Tel Aviv bahwa aspek-aspek inti dari perilaku mereka, bahkan yang melibatkan tindakan internal yang represif atau tindakan eksternal yang agresif yang terkait dengan konflik, tidak akan menghadapi konsekuensi internasional yang berarti jika mereka tetap mendapatkan dukungan dari pelindung yang kuat.(The Conversation, 2025). Akibatnya, para pemimpin di kedua negara mengeksploitasi kekebalan hukum ini untuk mengintensifkan penindasan domestik Iran menindak perbedaan pendapat dengan kedok menentang hegemoni Barat dan menjaga keamanan nasional. Israel memperluas permukiman dan memperketat kontrol di wilayah pendudukan dengan alasan ancaman eksistensial karena mengetahui bahwa DK PBB tidak akan mampu memberikan tantangan yang efektif. Selain itu, ketidaksetaraan yang mencolok dalam representasi, di mana wilayah yang luas seperti Afrika, Amerika Latin, atau sebagian Asia yang lebih luas tidak memiliki kursi permanen, menumbuhkan persepsi yang meluas bahwa lembaga tersebut mewujudkan hegemoni Barat.(Al Jazeera, 2024).

Persepsi ini digunakan secara internal oleh kedua rezim. Iran menggunakan narasi PBB yang "didominasi Barat" untuk mendelegitimasi kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan program nuklir mereka, membingkai perlawanan sebagai tugas patriotik melawan neo-imperialisme dan dengan demikian memperkuat dasar-dasar ideologis aparatus represif mereka.(VOA Indonesia, 2021). Demikian pula, para pemimpin Israel sering menganggap kecaman PBB sebagai sesuatu yang bias, berakar pada antisemitisme atau sentimen anti-Barat, dan menggunakan hal ini untuk menggalang dukungan dalam negeri dan menjustifikasi pembangkangan terhadap norma-norma internasional terkait pendudukan dan perlakuan

terhadap warga Palestina. (Rosdalina, 2024). Dinamika ini meluas di luar DK PBB ke badan-badan internasional lainnya dengan tuduhan politisasi dan penegakan hukum yang tebang pilih yang melanda lembaga-lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang semakin mengikis kredibilitas mereka di mata kedua negara.

Pada akhirnya, kelemahan struktural lembaga-lembaga global, terutama kelumpuhan yang disebabkan oleh veto DK PBB dan ketidaksetaraan representasi, menciptakan lingkungan yang acuh tak acuh di mana penindasan tumbuh subur di dalam negeri sebagai alat keamanan rezim, kebijakan-kebijakan yang digerakkan oleh konflik tidak menghadapi hambatan internasional yang efektif, dan rasa saling curiga yang semakin mendalam, yang secara aktif memperkuat kekuatan-kekuatan yang memperpanjang konfrontasi Iran-Israel. (Maulana, 2024).

Sebagai kesimpulan, sistem internasional menunjukkan selektivitas yang mendalam dalam memberikan legitimasi kepada para aktor konflik, sebuah proses yang tertanam kuat dalam struktur kekuasaan global yang tidak setara. Aktor-aktor negara yang dominan, terutama negara-negara besar, memanfaatkan pengaruh mereka di dalam lembaga-lembaga internasional dan melalui jalur-jalur diplomatik untuk mengakui entitas-entitas yang selaras dengan kepentingan strategis atau ideologis mereka sembari mendelegitimasi pihak-pihak yang berseberangan. Hal ini terlihat jelas dalam penerapan label yang tidak konsisten seperti "teroris" melawan "pejuang kebebasan", di mana taktik serupa menerima penilaian legitimasi yang berbeda berdasarkan hubungan aktor dengan negara-negara kuat. (Beydoun, 2022). Akibatnya, selektivitas sistemik dalam melegitimasi aktor-aktor konflik ini tidak hanya menggambarkan hubungan internasional, tetapi juga secara aktif menopang konflik dengan mengukuhkan ketidakseimbangan kekuasaan, melindungi pelaku yang disukai, dan mendelegitimasi perlawanan, sehingga menghalangi resolusi yang adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Iran Israel tahun 2025 bukan sekadar konfrontasi regional atau persoalan pertahanan semata, melainkan cerminan dari dinamika struktural yang lebih dalam yaitu praktik negara represif dan ketimpangan sistem internasional. Melalui pendekatan teori kritis, penelitian ini menyoroti bahwa baik Iran maupun Israel memanfaatkan konflik sebagai alat legitimasi kekuasaan domestik dan eksternal, di mana represi internal, militerisasi, dan justifikasi ideologis menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas politik rezim masing-masing.

Lebih jauh, konflik ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berkembang dalam lanskap internasional yang timpang, di mana aktor-aktor global memainkan peran aktif dalam memperkuat dan mempertahankan eskalasi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga sebagai sponsor kekuatan melalui bantuan militer, diplomasi selektif, serta kontrol atas narasi dan media internasional. Ketimpangan ini diperkuat oleh lembaga internasional yang gagal menjalankan fungsi netral karena terjebak dalam kepentingan kekuasaan hegemonik.

Dengan demikian, konflik Iran Israel mencerminkan wajah sistem global yang menormalisasi kekerasan demi mempertahankan tatanan yang menguntungkan pihak-pihak dominan. Teori kritis memberikan alat penting untuk memahami bahwa perdamaian sejati tidak mungkin tercapai selama praktik represif dan ketimpangan global tetap menjadi fondasi utama dalam pengelolaan hubungan internasional. Maka, solusi terhadap konflik ini bukan hanya melalui diplomasi formal atau intervensi militer, melainkan melalui pembongkaran struktur kekuasaan yang memproduksi dan memelihara konflik secara sistemik.

Reference

- Akgül, N. S. P. (2024). Iran's Sacred Duty: Advocating Palestine in the Face of National Identity Challenges. *Iran Çalışmaları Dergisi*, 8(2), 309-333. <https://doi.org/10.33201/iranian.1476211>
- Al Jazeera. (2024, August 12). Officials at UN Security Council push for a permanent seat for Africa. <https://www.aljazeera.com/news/2024/8/12/officials-at-un-security-council-push-for-a-permanent-seat-for-africa>.

- Ali, Z., Kousar, F., & Ahmed, S. (2025). The Israel-Iran Conflict: Shaping New Regional Dynamics in the Middle Ea. *Journal of Social Science and Knowledge Horizons*, 01(01), 29–40.
- Baldwin, C. (2023, October 27). How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza? <https://www.hrw.org/news/2023/10/27/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>.
- Barzilai, G. (1999). War, Democracy, and Internal Conflict: Israel in a Comparative Perspective. *Comparative Politics*, 31(3), 317. <https://doi.org/10.2307/422342>
- Beydoun, K. A. (2022, October 20). On Terrorists and Freedom Fighters. <https://harvardlawreview.org/forum/no-volume/on-terrorists-and-freedom-fighters/>.
- Christiastuti, N. (2025, March 11). Jet Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer . <https://news.detik.com/internasional/d-7818206/jet-tempur-israel-gempur-suriah-targetnya-lokasi-militer>.
- Cox, R. W. (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>
- DW. (2024). Bagaimana Rezim di Iran Menghadapi Ketidakpuasan Warga. <https://www.dw.com/id/bagaimana-rezim-di-iran-menghadapi-ketidakpuasan-warga/a-70313044>.
- Eslami, M. (2025, June 18). Israel tried to break Iran – but it may have actually helped unite it. <https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/18/israel-tried-to-break-iran-but-it-may-have-actually-helped-unite-it>.
- Fadya, S. N., Suhendra, M. N., Pinata, E., Hasibuan, J., Sununianti, V. V., & Kurniawan, D. A. (2024). GLOBAL SOCIAL MOVEMENT : UPAYA MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM MERESPON TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA MELALUI RESOLUSI KONFLIK NIR-KEKERASAN PADA KASUS ISRAEL – PALESTINA. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i4.95593>
- Febrian, R. (2020, January 20). Pengaruh Pasukan Revolusi Islam Iran (IRGC) di Timur Tengah. <https://voi.id/bernas/1509/pengaruh-pasukan-revolusi-islam-iran-irgc-di-timur-tengah>.
- Gordon, N. (2008). From Colonization to Separation: exploring the structure of Israel's occupation. *Third World Quarterly*, 29(1), 25–44. <https://doi.org/10.1080/01436590701726442>
- Hessa Al-Khaled, Shaikha Al-Humaidi, & Noor Al-Roumi. (2025). THE CONFIGURATION OF POWER IN THE MIDDLE EAST FOLLOWING THE ISRAEL-IRAN TENSION: A GEOPOLITICAL. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 123–132. <https://doi.org/10.60153/ijess.v1i2.204>
- Horton, J. (2021, May 21). Israel-Gaza: Israel mendapat gelontoran dana setidaknya Rp55 triliun per tahun dari Amerika Serikat, termasuk untuk sistem Kubah Besi. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57227969>.
- Ikenberry, G. J., & Nexon, D. H. (2019). Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders. *Security Studies*, 28(3), 395–421. <https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604981>
- Isaac, J., & Hilal, J. (2011). Palestinian landscape and the Israeli–Palestinian conflict. *International Journal of Environmental Studies*, 68(4), 413–429. <https://doi.org/10.1080/00207233.2011.582700>
- Machold, R. (2018). Reconsidering the laboratory thesis: Palestine/Israel and the geopolitics of representation. *Political Geography*, 65, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.04.002>

- Maulana, M. A. (2024). Comparative Analysis of Western Nations' Actions in Russia-Ukraine and Israel-Palestine Conflicts. *Nation State: Journal of International Studies*, 7(1), 29–52. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v7i1.1558>
- Noviyanto, H., Burhanuddin, A., & Abdullah, N. (2025). Security and Sovereignty in The Strait of Hormuz. *Journal of Peace, Security and Democracy*, 1(1), 87–105. <https://doi.org/10.63280/jpsd.v1i1.42245>
- Poustchian, M. (2025). Bangladeshi Scholar: Iran's Resistance Against Zionism Is a Battle of Faith and Justice. <https://En.Hawzahnews.Com/News/371677/Bangladeshi-Scholar-Iran-s-Resistance-Against-Zionism-Is-a-Battle>.
- Pratama, A. P., Wiratama, N. S., & Budiono, H. (2023). The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims. *JURNAL HISTORICA*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.19184/jh.v7i2.43976>
- Prayuda, R., Sundari.Rio, & Munir, F. (2021). STUDI TEORI KIRITIS DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 04(01), 52–59.
- RISTIYANTI, J. (2025). Dewan Keamanan PBB Dianggap Lambat Terapkan Sanksi ke Israel. <https://www.Tempo.Co/Internasional/Dewan-Keamanan-Pbb-Dianggap-Lambat-Terapkan-Sanksi-Ke-Israel-67952>.
- Rosdalina, I. (2024, July 28). Israel Marah Pakar PBB Bandingkan Netanyahu dengan Hitler. <https://www.Tempo.Co/Internasional/Israel-Marah-Pakar-Pbb-Bandingkan-Netany>